



Gerakan Politik Islam Kontemporer Dunia Melayu dan Samudera Hindia (Suatu Analisis Indonesia-Mesir)

Eka Januar¹, Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad², Syamsul Rijal³, Zubaidah⁴

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Penulis Korespondensi: eka.januar@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji gerakan politik Islam kontemporer di Dunia Melayu dan Samudera Hindia, sebuah wilayah dengan sejarah interaksi Islam yang kaya. Menggunakan pendekatan interdisipliner Ilmu Politik dan Studi Islam, analisis ini mengeksplorasi karakteristik, ideologi, strategi, dan dampak gerakan tersebut, serta interaksinya dengan lanskap politik regional. Melalui analisis komparatif, gerakan di kawasan ini dibandingkan dengan dinamika politik Islam di Indonesia dan Mesir. Penelitian ini menggunakan beberapa teori Teori diantaranya Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*) McCarthy & Zald, untuk menjelaskan bagaimana gerakan politik Islam berhasil mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya (resources) seperti jaringan keagamaan (tarekat, organisasi massa), dana, kepemimpinan karismatik, dan dukungan massa untuk mencapai tujuan politik, kemudian teori kerangka sistem politik David Easton (input-output model) Digunakan secara spesifik untuk menganalisis Ikhwanul Muslimin di Mesir, bagaimana mereka memengaruhi dinamika politik melalui tuntutan demokrasi (input) dan kebijakan sosial-ekonomi (output). Metode penelitian mencakup analisis kualitatif terhadap dokumen, literatur, dan perbandingan lintas negara. Temuan menunjukkan variasi signifikan dalam gerakan politik Islam regional, dipengaruhi oleh konteks lokal, regional, dan global. Perbandingan dengan Indonesia dan Mesir menyoroti persamaan tantangan dan perbedaan adaptasi ideologis serta kultural. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman peran gerakan politik Islam dalam dinamika politik dan sosial di Dunia Melayu dan Samudera Hindia, serta implikasinya bagi stabilitas regional.

Kata Kunci: Gerakan Politik Islam; Dunia Melayu; Samudera Hindia; Indonesia; Mesir.

PENDAHULUAN

Gerakan politik Islam kontemporer telah menjadi aktor yang semakin signifikan dalam lanskap politik global, dan kawasan Dunia Melayu serta Samudera Hindia tidak terkecuali. Wilayah ini, yang membentang dari Asia Tenggara hingga Asia Selatan dan sebagian Afrika Timur, memiliki sejarah panjang dan mendalam dalam penyebaran serta adaptasi ajaran Islam. Keberadaan Islam di kawasan ini tidak hanya membentuk identitas budaya dan sosial, tetapi juga secara inheren terjalin dengan dinamika kekuasaan, governance, dan aspirasi politik masyarakatnya. Gerakan-gerakan ini muncul dari berbagai konteks lokal yang unik, namun seringkali terhubung oleh narasi ideologis, aspirasi kolektif, dan respons terhadap tantangan baik internal maupun eksternal (Okthariza, 2022). Pengaruh sejarah dan budaya Islam di Dunia Melayu dan Samudera Hindia telah menciptakan fondasi yang beragam bagi kemunculan gerakan politik Islam. Mulai dari kesultanan-kesultanan Islam masa lalu hingga modernisasi dan tantangan pasca-kolonial, warisan keislaman terus membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran agama dalam kehidupan publik dan kenegaraan (Bustamam-Ahmad, 2011). Untuk lebih memahami kedalaman sejarah ini, perlu dicatat bahwa penyebaran Islam di kawasan Samudera Hindia sering kali melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama seperti Malaka, Aceh, dan Gujarat, di mana pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa tidak hanya barang dagangan tetapi juga ide-ide keagamaan yang beradaptasi dengan tradisi lokal.

Pada Dunia Melayu, misalnya, kerajaan-kerajaan pra-Islam seperti Srivijaya dan Majapahit memberikan fondasi bagi transisi ke kesultanan Islam, di mana agama menjadi alat legitimasi kekuasaan, mencampurkan elemen-elemen Hindu-Budha dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan bentuk Islam yang sinkretis dan toleran terhadap pluralisme budaya. Proses ini tidak statis; sebaliknya, ia berevolusi melalui interaksi dengan kekuatan kolonial Eropa, yang memaksa komunitas Muslim untuk mereformulasi identitas mereka, sering kali melalui gerakan revivalis seperti yang terlihat di abad ke-19 dengan pengaruh Wahabi atau reformis Mesir (Eliraz, 2002). Pengaruh ini menciptakan tradisi politik Islam yang unik di Malay World, di mana agama bukan hanya spiritualitas pribadi tetapi juga kerangka untuk perlawanan terhadap kolonialisme dan pembentukan negara-bangsa pasca-kemerdekaan. Dalam konteks kontemporer, gerakan-gerakan ini berupaya untuk mengartikulasikan kembali dan mengimplementasikan gagasan-gagasan Islam dalam kerangka politik modern, merespons isu-isu seperti demokrasi, keadilan sosial, identitas nasional, dan kedaulatan. Di Indonesia, organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mewakili model politik Islam yang moderat, di mana fokus pada pendidikan, kesejahteraan sosial, dan partisipasi demokrasi mencerminkan adaptasi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, sementara di Malaysia, partai seperti Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan kebijakan Islamisasi oleh United Malays National Organisation (UMNO) menunjukkan integrasi agama ke dalam struktur pemerintahan, sering kali untuk memperkuat identitas Melayu-Muslim di tengah masyarakat multietnis.

Pada wilayah Samudera Hindia yang lebih luas, seperti di India Selatan atau Afrika Timur (misalnya Tanzania dan Kenya), gerakan seperti Jamaat-e-Islami atau komunitas Swahili menekankan perjuangan melawan marginalisasi etnis dan ekonomi, di mana Islam menjadi alat untuk advokasi hak sipil dan keadilan sosial, terinspirasi oleh narasi pan-Islamis yang melintasi batas negara. Tantangan eksternal seperti globalisasi neoliberal dan konflik geopolitik (seperti isu Palestina atau pengaruh Cina di Laut China Selatan) semakin memperkuat solidaritas

transnasional di antara gerakan ini, di mana media sosial dan diaspora memainkan peran kunci dalam menyebarkan ideologi, meskipun sering kali disertai risiko radikalisme atau kooptasi oleh aktor negara. Selain itu, pengaruh Arabisasi dari Teluk Persia dan hubungan dengan Turki-Persia telah membentuk dinamika intra Muslim, di mana gerakan di Malay World berusaha menyeimbangkan antara identitas lokal dan aspirasi umat global, menghindari sektarianisme sambil mempromosikan dialog antaragama (de Coning et al., 2025).

Sebagai perbandingan yang memperkaya pemahaman, gerakan politik Islam kontemporer di Mesir menawarkan perspektif kontras yang menyoroti dinamika represi, adaptasi, dan transformasi di bawah rezim otoriter. Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood/MB), sebagai gerakan paling ikonik, telah mengalami evolusi signifikan pasca-Arab Spring 2011, di mana mereka sempat naik ke tampuk kekuasaan melalui Partai Kebebasan dan Keadilan (Freedom and Justice Party) di bawah presiden Mohamed Morsi, sebelum digulingkan melalui kudeta militer 2013 (Oztig, 2023). Sejak itu, MB beroperasi sebagai gerakan di pengasingan, fokus pada strategi survival melalui framing ideologis yang menekankan ketahanan organisasional, solidaritas internasional, dan penolakan kekerasan, meskipun menghadapi fragmentasi internal antara faksi lama (konservatif) dan muda (reformis). Analisis menggunakan kerangka sistem politik David Easton menunjukkan bagaimana MB memengaruhi dinamika politik Mesir melalui input seperti tuntutan demokrasi dan output seperti kebijakan sosial-ekonomi selama masa kekuasaan singkatnya, tapi kini menghadapi tantangan besar dari represi negara yang mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris, menyebabkan penangkapan massal dan pengasingan ke negara seperti Turki dan Qatar. Di tengah itu, MB bertransformasi dari gerakan sosial ke entitas politik yang lebih pragmatis, meskipun kehilangan pengaruh domestik dan bergantung pada jaringan diaspora untuk mempertahankan relevansi, dengan isu seperti keadilan sosial dan anti-otoritarianisme tetap menjadi inti aspirasi mereka.

Berbeda dengan model moderat di Dunia Melayu yang lebih terintegrasi ke dalam demokrasi pluralis, MB di Mesir mencerminkan pola siklus radikalisme dan marginalisasi akibat konfrontasi dengan negara, di mana pengaruh regional (seperti dukungan dari Turki atau oposisi dari Saudi-UAE) semakin membentuk strategi mereka. Fenomena ini menekankan bagaimana gerakan politik Islam di Mesir, meski ditekan, tetap menjadi model ideologis bagi gerakan global, termasuk di Samudera Hindia, di mana narasi perlawanan terhadap otoritarianisme sering kali diadopsi untuk konteks lokal. Namun, masa depan MB tetap tidak pasti, dengan skenario potensial seperti reinvensi ideologis, fragmentasi lebih lanjut, atau kembalinya ke akar sosial daripada politik langsung, di tengah tren polarisasi keagamaan yang lebih luas di wilayah Arab.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini menerapkan beberapa kerangka teori secara eklektik untuk menganalisis data, menjelaskan fenomena gerakan politik Islam, serta menginterpretasikan temuan secara mendalam. Salah satu teori utama yang digunakan adalah Teori Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization Theory) (Zald & McCarthy, 1979), teori ini membantu menjelaskan bagaimana gerakan politik Islam mengumpulkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya, seperti jaringan keagamaan, dana, kepemimpinan karismatik, serta dukungan massa, guna mencapai tujuan politik. kemudian teori Islamisme Sayyid Qutb (Qutb, 1964), untuk mengkaji bagaimana Islam diartikulasikan sebagai ideologi politik. Keragaman ideologi gerakan mulai

dari yang moderat hingga konservatif atau radikal dipahami sebagai hasil perbedaan ijtihad terhadap sumber hukum Islam serta visi mengenai peran agama dalam negara dan masyarakat. Tujuannya untuk perbandingan antara penekanan pada demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia serta kawasan Dunia Melayu dengan agenda yang lebih berorientasi pada penerapan syariat di Mesir, yang dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Islam dan konteks sejarah masing-masing wilayah.

Selain itu, Teori Kelembagaan (Institutional Theory) B. Guy Peters, (Peters, 2019) digunakan untuk menganalisis interaksi gerakan politik Islam dengan struktur kelembagaan negara dan masyarakat. Gerakan di Indonesia dan Malaysia cenderung beradaptasi dengan kerangka demokrasi liberal melalui partisipasi dalam pemilu dan koalisi pemerintahan, Teori Identitas dan Framing (Identity and Framing Theory) David A. Snow, Robert D. Benford, turut diterapkan untuk memahami bagaimana gerakan membangun narasi serta identitas kolektif guna memobilisasi dukungan publik. Gerakan politik Islam memanfaatkan simbol-simbol keagamaan, retorika tentang keadilan Islam, serta framing isu sosial-politik dalam kerangka agama untuk menciptakan kohesi internal dan menarik simpati masyarakat. Kemudian kerangka sistem politik David Easton (model input-output) (Easton, 1965) secara khusus digunakan untuk menganalisis Ikhwanul Muslimin di Mesir, terutama bagaimana organisasi tersebut memengaruhi dinamika politik melalui tuntutan demokrasi sebagai input dan kebijakan sosial ekonomi sebagai output, sehingga memungkinkan perbandingan antara gerakan di kawasan Dunia Melayu dan Samudera Hindia, Indonesia, serta Mesir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dua bidang ilmu utama Politik dan Studi Islam. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap kompleksitas gerakan politik Islam kontemporer yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya dari satu disiplin ilmu. Dari perspektif Ilmu Politik, penelitian ini akan menganalisis aktor/lembaga politik, struktur kekuasaan, proses pengambilan keputusan, strategi mobilisasi, dan hubungan antara negara dan gerakan Islam. Sementara itu, dari perspektif Studi Islam, penelitian ini akan menggali landasan ideologis, interpretasi teks-teks keagamaan, narasi teologis, dan agenda normatif yang mendasari gerakan-gerakan tersebut yang bersumber dari berbagai literatur yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi analisis komparatif sebagai metode kunci. Pendekatan komparatif memungkinkan identifikasi persamaan dan perbedaan signifikan antara gerakan politik Islam di kawasan Dunia Melayu dan Samudera Hindia dengan contoh-contoh dari Indonesia dan Mesir. Dengan membandingkan berbagai kasus, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih kaya, memperluas generalisasi teoritis, dan menyoroti kekhasan kontekstual dari fenomena yang dikaji. Integrasi kedua pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap objek studi.

Penelitian ini dirancang menggunakan desain studi kasus komparatif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat fenomena yang dikaji (gerakan politik Islam) yang kompleks, multidimensional, dan seringkali sulit diukur secara kuantitatif. Desain ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna, motivasi, strategi, dan konteks sosial-politik yang melingkupi gerakan-gerakan tersebut. Studi kasus komparatif akan difokuskan pada

tiga unit analisis utama: (1) gerakan politik Islam di kawasan Dunia Melayu dan Samudera Hindia secara umum (mengeksplorasi pola-pola umum atau representatif), (2) gerakan politik Islam di Indonesia, dan (3) gerakan politik Islam di Mesir. Pemilihan Indonesia mewakili kekayaan dinamika Islam politik di Asia Tenggara yang dekat dengan Dunia Melayu, sementara Mesir dipilih sebagai pusat tradisi pemikiran dan gerakan Islam di Timur Tengah yang memiliki pengaruh luas. Perbandingan antar unit analisis ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor penentu yang memengaruhi bentuk dan perkembangan gerakan politik Islam di wilayah-wilayah tersebut. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik dan komparatif untuk membangun pemahaman yang holistik dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Gerakan Politik Islam Kontemporer di Kawasan Dunia Melayu dan Samudera Hindia menunjukkan keragaman yang kaya dalam hal karakteristik, ideologi, strategi, dan basis dukungannya, mencerminkan konteks sejarah, sosial, dan politik yang unik di setiap negara. Gerakan-gerakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai faktor, termasuk warisan kolonial, tantangan modernisasi, aspirasi demokratisasi, serta keinginan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik dan tata kelola negara.

a. Sejarah Muncul dan Evolusi Gerakan dalam Konteks Regional

Banyak gerakan politik Islam di kawasan ini memiliki akar sejarah yang panjang, seringkali berawal dari gerakan reformis Islam pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang kemudian berkembang menjadi organisasi politik formal pasca-kolonial. Evolusi mereka dipengaruhi oleh dinamika politik domestik seperti transisi demokrasi, represi rezim otoriter, serta isu-isu regional (Nasihin & Dahlan, 2022), Misalnya, di Indonesia, gerakan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berevolusi dari gerakan dakwah menjadi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, sementara di Malaysia, partai seperti Parti Islam Se-Malaysia (PAS) terus memperjuangkan agenda Islamisasi dalam kerangka konstitusional negara. Di Bangladesh, partai-partai seperti Jamaat-e-Islami telah memiliki sejarah panjang dalam arena politik (Zulkarnaini et al., 2022).

b. Ideologi, Tafsir Islam, dan Agenda Politik

Ideologi gerakan politik Islam di kawasan ini sangat bervariasi. Ada yang menganut platform Islam yang lebih moderat dan inklusif, menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia dalam kerangka Islam (Amirulkamar & Januar, 2021), Contohnya, sebagian besar partai Islam di Indonesia dan Malaysia yang berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, terdapat pula gerakan yang mengusung interpretasi Islam yang lebih konservatif atau bahkan radikal (Latif, 2024), dengan agenda yang lebih spesifik terkait penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Agenda politik mereka seringkali mencakup isu-isu seperti penegakan hukum Islam, pemberdayaan ekonomi umat, serta isu-isu moral dan sosial.

c. Struktur Organisasi, Jaringan, dan Basis Dukungan

Struktur organisasi gerakan ini bervariasi dari partai politik formal dengan struktur hierarkis hingga jaringan informal yang lebih longgar. Basis dukungan mereka seringkali berasal

dari segmen masyarakat yang memiliki identitas keagamaan kuat, komunitas pengajian, organisasi kemahasiswaan Islam, serta segmen masyarakat yang merasa terpinggirkan secara ekonomi atau politik. (Sumaktoyo, 2025) Jaringan mereka dapat meluas ke tingkat regional dan bahkan internasional.

d. Strategi dan Taktik Politik

Strategi yang digunakan bervariasi, mulai dari partisipasi dalam pemilihan umum dan kerja sama dengan pemerintah (misalnya, PKS di Indonesia), advokasi kebijakan publik melalui lobi dan kampanye, hingga mobilisasi massa melalui demonstrasi. Beberapa gerakan juga memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Pilihan strategi seringkali dipengaruhi oleh kondisi politik domestik, tingkat kebebasan sipil, dan respon dari negara serta masyarakat (Khamdan et al., 2025).

Interaksi Gerakan dengan Lanskap Politik dan Sosial Regional

Gerakan politik Islam di kawasan Dunia Melayu dan Samudera Hindia tidak beroperasi dalam ruang hampa. Mereka secara aktif berinteraksi dengan berbagai elemen dalam lanskap politik dan sosial regional, yang pada gilirannya memengaruhi strategi, keberhasilan, dan bahkan evolusi gerakan itu sendiri. Interaksi ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, struktural, dan kontemporer

a. Hubungan dengan Negara dan Aparat Pemerintah

Hubungan antara gerakan politik Islam dengan negara sangat bervariasi, mulai dari kooperasi hingga konfrontasi. Beberapa gerakan berhasil mengintegrasikan diri ke dalam sistem politik negara melalui partisipasi dalam pemilu, menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, atau menduduki posisi dalam parlemen dan pemerintahan. (Zulian & Hayati, 2024) Dalam kasus seperti ini, gerakan berupaya memengaruhi kebijakan publik dari dalam sistem, meskipun seringkali harus berkompromi dengan agenda politik yang lebih luas. Contohnya adalah peran partai-partai Islam di Indonesia atau Malaysia dalam pemerintahan koalisi. Di sisi lain, banyak gerakan yang berada dalam posisi oposisi atau bahkan berkonflik dengan negara. Ini bisa terjadi karena ideologi gerakan yang dianggap mengancam stabilitas negara, penolakan terhadap sistem politik sekuler, atau represi yang dilakukan oleh rezim otoriter. Dalam situasi seperti ini, gerakan mungkin menggunakan taktik advokasi di luar sistem, mobilisasi massa, atau bahkan, dalam kasus ekstrem, beralih ke jalur kekerasan (meskipun mayoritas gerakan di kawasan ini beroperasi secara damai) (Barton et al., 2021). Tingkat kebebasan sipil, kemerdekaan peradilan, dan toleransi politik di suatu negara sangat memengaruhi bentuk interaksi ini.

b. Hubungan dengan Kelompok Masyarakat Sipil Lainnya

Gerakan politik Islam juga menjalin relasi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya, termasuk organisasi sekuler, kelompok etnis minoritas, gerakan perempuan, dan organisasi keagamaan non-Islam. Hubungan ini bisa bersifat kooperatif, misalnya dalam isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, atau isu lingkungan. Namun, potensi konflik juga selalu ada, terutama terkait isu-isu identitas, moralitas publik, dan pluralisme (Barton et al., 2021). Kemampuan gerakan politik Islam untuk membangun aliansi strategis dengan kelompok

masyarakat sipil lain seringkali krusial bagi keberhasilan advokasi mereka dan legitimasi sosial yang mereka miliki

c. Pengaruh Isu-isu Geopolitik dan Ekonomi Regional terhadap Gerakan

Konteks geopolitik regional dan global, serta kondisi ekonomi, memiliki dampak signifikan terhadap gerakan politik Islam. Isu-isu seperti konflik di Timur Tengah, kebijakan luar negeri negara-negara besar, serta tren ekonomi global dapat memengaruhi narasi ideologis, sumber pendanaan, dan strategi gerakan. Misalnya, isu-isu terkait Palestina atau konflik Suriah seringkali menjadi tema sentral dalam mobilisasi massa oleh gerakan Islam di Asia Tenggara. Perubahan kondisi ekonomi, seperti kenaikan harga komoditas atau krisis ekonomi, juga dapat memengaruhi basis dukungan gerakan, terutama jika mereka mengartikulasikan agenda pemberdayaan ekonomi umat (Sebastian et al., 2021). Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membuka jalur baru bagi penyebaran ideologi dan mobilisasi, baik di tingkat lokal maupun global (Yasih & Hadiz, 2023)

Studi Kasus Komparatif Gerakan Politik Islam

a. Gerakan Politik Islam di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan bagian integral dari kawasan Dunia Melayu, memiliki lanskap politik Islam yang sangat dinamis dan beragam. Gerakan politik Islam di Indonesia mencakup spektrum luas, mulai dari partai-partai yang berpartisipasi dalam sistem demokrasi elektoral, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berakar pada gerakan dakwah dan berupaya mengartikulasikan Islam dalam kerangka demokrasi Pancasila, hingga organisasi masyarakat Islam yang memiliki pengaruh besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang meskipun bukan partai politik, memiliki agenda politik dan sosial yang kuat. Terdapat pula gerakan Islam yang lebih konservatif dan terkadang kontroversial, yang menuntut penerapan syariat Islam secara lebih eksplisit dalam ranah publik. Strategi gerakan di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari partisipasi pemilu, advokasi kebijakan, hingga kegiatan dakwah dan sosial. Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang Indonesia dalam menghadapi pluralisme, kolonialisme, dan transisi menuju demokrasi

b. Gerakan Politik Islam di Mesir

Mesir, sebagai pusat intelektual dan politik Islam di Timur Tengah, memiliki sejarah gerakan politik Islam yang kaya dan kompleks, yang seringkali memiliki pengaruh ideologis yang luas di dunia Muslim, termasuk kawasan Samudera Hindia. Organisasi seperti Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) adalah contoh paling menonjol, dengan sejarah panjang perjuangan politik, ideologi yang berupaya mengintegrasikan Islam ke dalam kehidupan negara dan masyarakat, serta berbagai strategi yang diterapkan, termasuk partisipasi politik, dakwah, dan kegiatan sosial. (Duman, 2024) Selain Ikhwanul Muslimin, Mesir juga memiliki berbagai gerakan Islam lain dengan spektrum ideologi dan strategi yang berbeda, dari yang lebih moderat hingga yang lebih radikal (Schwartz & Galily, 2021). Dinamika politik Mesir, yang seringkali ditandai dengan ketegangan antara gerakan Islam dan negara, serta pergolakan politik internal, telah membentuk evolusi gerakan-gerakan ini (Zulkarnaen et al., n.d.)

Perbandingan antara gerakan politik Islam di Dunia Melayu/Samudera Hindia, Indonesia, dan Mesir menunjukkan adanya persamaan dalam aspirasi dasar untuk mengintegrasikan Islam dalam kehidupan publik dan kepemimpinan politik. Banyak gerakan di ketiga wilayah ini berjuang untuk keadilan sosial, moralitas publik, dan identitas keislaman (Fitriani, 2025) Namun, terdapat juga perbedaan signifikan. Gerakan di Indonesia dan kawasan Dunia Melayu cenderung lebih beradaptasi dengan konteks pluralistik dan kerangka demokrasi yang ada, meskipun dengan berbagai tingkat penekanan pada syariat. Sebaliknya, gerakan di Mesir seringkali menghadapi lingkungan politik yang lebih represif dan memiliki tradisi pemikiran Islam yang lebih sentralistik, yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan negara dan masyarakat. Perbedaan dalam sejarah kolonial, struktur negara, dan tradisi keilmuan Islam juga menjadi faktor krusial yang membedakan evolusi dan strategi gerakan di wilayah-wilayah ini.

Interpretasi Temuan Penelitian dalam Konteks Teori yang Relevan Temuan mengenai karakteristik, interaksi, dan perbandingan gerakan politik Islam di Dunia Melayu dan Samudera Hindia, Indonesia, serta Mesir dapat diinterpretasikan melalui berbagai lensa teoritis dalam Ilmu Politik dan Studi Islam. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*). Teori ini membantu menjelaskan bagaimana gerakan politik Islam berhasil mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya (seperti jaringan keagamaan, dana, kepemimpinan karismatik, dan dukungan massa) untuk mencapai tujuan politik mereka. Misalnya, kekuatan jaringan tarekat atau organisasi massa Islam di Indonesia dan Mesir menjadi sumber daya krusial bagi mobilisasi politik. Variasi dalam keberhasilan gerakan dapat dikaitkan dengan efektivitas mereka dalam mengelola sumber daya ini dalam konteks politik dan sosial yang berbeda. Dari perspektif Studi Islam, temuan mengenai ideologi dan tafsir Islam memiliki signifikansi teoretis yang mendalam. Keragaman ideologi gerakan (dari moderat hingga konservatif) mencerminkan perbedaan dalam ijtihad (penafsiran) terhadap sumber-sumber hukum Islam dan visi mengenai peran Islam dalam negara dan masyarakat.

Teori-teori tentang Islamisme, yang mengkaji bagaimana Islam diartikulasikan sebagai ideologi politik, dapat membantu menjelaskan keragaman ini. Misalnya, perbandingan antara penekanan pada demokrasi dan keadilan sosial oleh gerakan di Indonesia dengan agenda yang lebih berorientasi pada syariat di Mesir dapat dikaitkan dengan perbedaan tradisi pemikiran Islam dan konteks sejarah masing-masing. Selanjutnya, Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*) dapat menjelaskan bagaimana gerakan politik Islam berinteraksi dengan struktur kelembagaan negara dan masyarakat. Adopsi strategi partisipasi pemilu oleh gerakan di Indonesia dan Malaysia, misalnya, menunjukkan bagaimana gerakan beradaptasi dengan kerangka kelembagaan demokrasi liberal. Sebaliknya, di Mesir, di mana ruang politik seringkali lebih terbatas, gerakan mungkin mengembangkan strategi yang berbeda untuk bertahan dan beroperasi. Hubungan antara gerakan Islam dan negara, yang bervariasi dari kooperasi hingga konfrontasi, dapat dianalisis melalui teori-teori tentang hubungan negara-agama dan dinamika kekuasaan. Terakhir, Teori Identitas dan Framing relevan untuk memahami bagaimana gerakan politik Islam membangun narasi dan identitas kolektif untuk memobilisasi dukungan.

Penggunaan simbol-simbol keagamaan, retorika tentang keadilan Islam, dan framing isu-isu sosial-politik dalam kerangka Islam menjadi alat penting dalam membangun kohesi internal dan menarik simpati publik. Perbedaan dalam framing isu antara gerakan di Dunia Melayu dan Mesir dapat mencerminkan perbedaan dalam penekanan budaya dan historis Islam di masing-masing wilayah. Temuan dari penelitian ini memiliki beberapa titik temu dan perbedaan dengan

literatur yang sudah ada mengenai gerakan politik Islam. Banyak penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi pentingnya konteks lokal dan regional dalam membentuk ideologi dan strategi gerakan politik Islam. Misalnya, karya Arif Dirlik tentang transnasionalisme dan pergerakan Islam, serta analisis Mark R. Woodward mengenai Islam di Asia Tenggara, secara konsisten menekankan pengaruh unik dari sejarah dan budaya lokal. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan tersebut dengan menyoroti kekhasan gerakan di Dunia Melayu dan Samudera Hindia yang dipengaruhi oleh sejarah Islamisasi regional dan interaksi dengan budaya lokal. Studi terdahulu seringkali fokus pada satu negara atau satu gerakan spesifik. Misalnya, kajian tentang Ikhwanul Muslimin di Mesir oleh Mona M. Amer atau Tarek Osman telah memberikan analisis mendalam tentang evolusi ideologi dan strategi organisasinya. Penelitian ini memperluas cakupan dengan membandingkan dinamika tersebut dengan gerakan di Indonesia dan kawasan Dunia Melayu secara lebih luas.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam aspirasi umum untuk mengintegrasikan Islam dalam politik, mekanisme adaptasi terhadap kerangka demokrasi liberal dan pluralisme di Indonesia, seperti yang dianalisis oleh R. Michael Feener dan J. Spencer, berbeda secara signifikan dari cara gerakan di Mesir menavigasi lingkungan politik yang seringkali lebih represif. Fenomena partisipasi politik elektoral gerakan Islam di Indonesia dan Malaysia, yang sering dikaji dalam literatur oleh Saiful Mujani atau Farish A. Noor, juga dikonfirmasi dalam temuan ini. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi komparatif dengan Mesir untuk memperjelas bagaimana perbedaan sistem politik dan tradisi keagamaan memengaruhi pilihan strategi. Literatur yang mengkaji peran media sosial dalam mobilisasi politik Islam, seperti karya Lorenzo Ferrari, juga relevan, dan temuan ini menunjukkan bagaimana teknologi ini digunakan di berbagai konteks regional.

Kajian tentang Islam politik di kawasan Samudera Hindia, termasuk negara seperti Pakistan dan Bangladesh, oleh peneliti seperti Iqbal Akhtar atau S.M. Hossain, juga memberikan konteks penting mengenai variasi regional. Kajian ini juga mengisi kesenjangan dalam literatur yang berfokus pada kawasan Dunia Melayu dan Samudera Hindia secara kolektif, serta menyoroti bagaimana isu-isu geopolitik regional dan pengaruh global berinteraksi dengan gerakan politik Islam di wilayah ini. Perbandingan dengan Mesir, sebagai pusat pemikiran Islam global, membantu mengukuhkan pemahaman tentang bagaimana ide-ide Islam politik menyebar dan diadaptasi di berbagai konteks.

Temuan dari penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoritis dan empiris yang signifikan bagi pemahaman kita tentang gerakan politik Islam, khususnya dalam konteks Dunia Melayu dan Samudera Hindia. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa gerakan politik Islam bukanlah fenomena monolitik, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, regional, dan sejarah. Keragaman ideologi dan strategi yang teramati di kawasan ini, serta perbedaan yang muncul saat dibandingkan dengan Indonesia dan Mesir, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bernuansa dalam menganalisis Islam politik. Ini menantang model-model teoritis yang terlalu menyederhanakan atau menggeneralisasi gerakan Islam secara global, dan menekankan pentingnya studi kasus yang mendalam serta analisis komparatif yang sensitif terhadap konteks. Implikasi teoritis lainnya berkaitan dengan interaksi antara Islam, politik, dan budaya. Temuan ini menunjukkan bagaimana gerakan politik Islam di Dunia Melayu secara aktif menegosiasikan warisan budaya Islam lokal, norma-norma sosial, dan tradisi politik yang ada.

Ini menggarisbawahi pentingnya memahami bagaimana Islam politik beradaptasi dan dibentuk oleh konteks sosio-kultural, bukan hanya sebagai produk ideologi transnasional.

Analisis komparatif dengan Mesir juga menyoroti bagaimana perbedaan dalam sejarah negara-negara Muslim (misalnya, pengalaman kolonial, tradisi pemikiran) memengaruhi cara gerakan politik Islam memposisikan diri terhadap negara dan masyarakat. Secara empiris, temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika politik kontemporer di kawasan Dunia Melayu dan Samudera Hindia. Pemahaman yang lebih baik mengenai strategi yang digunakan oleh gerakan politik Islam, baik melalui partisipasi elektoral maupun advokasi, dapat membantu para pembuat kebijakan dan analis politik dalam memprediksi dan merespons perkembangan politik di wilayah tersebut. Misalnya, pemahaman tentang bagaimana gerakan di Indonesia berinteraksi dengan sistem demokrasi dapat memberikan pelajaran bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Selain itu, implikasi temuan ini juga relevan bagi pemahaman tentang hubungan negara-agama di negara-negara mayoritas Muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan politik Islam terus menjadi aktor penting dalam mendefinisikan ruang publik dan peran agama dalam negara. Perbedaan dalam respons negara terhadap gerakan ini di berbagai negara (misalnya, toleransi di Indonesia versus kontrol ketat di Mesir pasca-revolusi) memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas politik, hak-hak sipil, dan arah perkembangan demokrasi di kawasan tersebut. Memahami bagaimana gerakan ini bernegosiasi dengan kekuatan politik yang ada adalah kunci untuk memahami masa depan politik di Dunia Melayu dan Samudera Hindia.

Gerakan politik Islam di Dunia Melayu dan Samudera Hindia, serta di Indonesia dan Mesir, beroperasi dalam lanskap yang terus berubah, dibentuk oleh kekuatan globalisasi dan regionalisasi. Dinamika ini menghadirkan serangkaian tantangan sekaligus peluang yang kompleks bagi kelangsungan dan evolusi gerakan-gerakan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi ideologis dan persaingan internal. Globalisasi telah memfasilitasi penyebaran berbagai interpretasi Islam, termasuk yang bersifat lebih radikal, yang dapat memecah belah gerakan Islam yang sebelumnya bersatu. Di sisi lain, persaingan antar gerakan untuk mendapatkan dukungan massa dan pengaruh politik dapat mempersulit pembentukan front persatuan yang kuat. Tantangan lainnya adalah respons negara dan masyarakat. Banyak negara di kawasan ini memiliki sejarah panjang dalam mengontrol atau bahkan menekan gerakan Islam, yang membatasi ruang gerak mereka. Selain itu, polarisasi masyarakat, baik yang berbasis agama maupun ideologi politik lainnya, juga dapat menjadi tantangan bagi gerakan yang ingin membangun basis dukungan yang luas. Di era globalisasi, penyebaran informasi melalui media digital dan media sosial menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini memberikan peluang besar bagi gerakan untuk menyebarkan ideologi mereka, merekrut anggota baru, dan membangun jaringan secara efisien, bahkan melintasi batas negara.

Gerakan politik Islam dapat memanfaatkan platform ini untuk melakukan advokasi, merespons isu-isu global, dan membangun narasi tandingan terhadap narasi dominan. Di sisi lain, media digital juga dapat menjadi medan perang informasi, di mana gerakan menghadapi disinformasi, kampanye negatif, dan pengawasan dari aparat negara. Regionalisasi, melalui forum-forum seperti ASEAN atau organisasi regional lainnya di Samudera Hindia, juga menawarkan peluang dan tantangan. Gerakan politik Islam dapat berupaya untuk membangun solidaritas regional, berbagi pengalaman, dan bahkan membentuk aliansi di tingkat regional untuk memengaruhi kebijakan kawasan. Namun, regionalisasi juga dapat berarti penyesuaian

dengan rezim keamanan regional yang mungkin membatasi ruang gerak gerakan Islam, atau persaingan dengan gerakan Islam dari negara lain yang memiliki agenda berbeda. Selain itu, perubahan demografi dan sosial-ekonomi di kawasan ini, seperti urbanisasi, peningkatan pendidikan, dan munculnya kelas menengah baru, menciptakan basis dukungan potensial sekaligus tantangan baru. Gerakan yang mampu beradaptasi dengan aspirasi dan kebutuhan segmen masyarakat yang berubah ini, serta mampu menawarkan solusi yang relevan terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi kontemporer, akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Tantangan untuk tetap relevan di tengah arus perubahan global dan mempertahankan legitimasi di mata publik, sambil menavigasi lanskap politik yang seringkali tidak stabil, akan terus menjadi agenda utama gerakan politik Islam di masa depan

KESIMPULAN

Gerakan politik Islam di kawasan Dunia Melayu dan Samudera Hindia sangat beragam dalam karakteristik, ideologi, strategi, dan dampaknya. Mereka berinteraksi dengan lanskap politik dan sosial regional melalui berbagai cara, mulai dari partisipasi dalam sistem elektoral hingga oposisi, serta menjalin relasi yang kompleks dengan negara dan masyarakat sipil. Antara Indonesia dan Mesir meskipun ada kesamaan dalam aspirasi untuk mengintegrasikan Islam dalam politik, terdapat perbedaan signifikan dalam ideologi, strategi adaptasi terhadap kerangka demokrasi atau otoritarianisme, tantangan yang dihadapi, serta implikasi teologis dan politisnya. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, struktur kelembagaan, dan tradisi pemikiran Islam di masing-masing wilayah. Gerakan di Dunia Melayu cenderung lebih beradaptasi dengan kerangka pluralistik, sementara di Mesir, dinamika interaksi dengan negara seringkali lebih konfrontatif dan ideologis.

Gerakan politik Islam di Dunia Melayu dan Samudera Hindia merupakan fenomena yang kompleks dan sangat bervariasi, yang dipengaruhi oleh konteks lokal yang spesifik. Diversitas ideologi, dari yang moderat hingga konservatif, serta variasi strategi politik, dari partisipasi elektoral hingga advokasi non-parlementer, menjadi ciri khas gerakan di kawasan ini. Perbandingan dengan Indonesia dan Mesir menyoroti bahwa adaptasi gerakan terhadap sistem politik yang berbeda (demokratis liberal versus lebih otoriter) serta tradisi pemikiran Islam yang berbeda, menghasilkan perbedaan signifikan dalam cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan negara serta masyarakat. Globalisasi dan regionalisasi juga terus membentuk lanskap ini, menghadirkan tantangan baru sekaligus peluang bagi gerakan untuk berinovasi dan memperluas jangkauan mereka.

Gerakan politik Islam terus menjadi aktor kunci dalam membentuk dinamika politik dan sosial di Dunia Melayu dan Samudera Hindia, serta di negara-negara pembanding. Keberagaman gerakan ini menuntut pendekatan yang lebih bernuansa dalam analisis politik dan studi Islam, menghindari generalisasi yang berlebihan. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana gerakan ini beradaptasi dengan konteks regional dan global sangat penting bagi stabilitas regional, dialog antarbudaya, dan formulasi kebijakan luar negeri yang efektif oleh berbagai negara. Penelitian ini menekankan bahwa dinamika Islam politik di kawasan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh interaksi kompleks dengan kekuatan geopolitik dan tren sosio-ekonomi global.

REFERENSI

- Amirulkamar, S., & Januar, E. (2021). Politik Dan Pemerintahan Islam. In *Zahir Publishig*.
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, islamic movements and contestations of islamic religious ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), 641.
- Bustamam-Ahmad, K. (2011). Contemporary Islamic thought in Indonesian and malay world: Islam liberal, Islam Hadhari, and islam Progresif. *Journal of Indonesian Islam*, 5(1), 91–129.
- de Coning, C., Saraiva, R., & Muto, A. (2025). *Resilience, Peacebuilding, and Preventing Violent Extremism: A Complex Systems Perspective on Sustaining Peace*. Taylor & Francis.
- Duman, T. İ. (2024). The Evolution of a Social Movement: The Muslim Brotherhood’s Path Between Political Ambition and the Rejection of Armed Struggle. *Religions*, 15(11), 1352.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life ER*.
- Eliraz, G. (2002). The Islamic Reformist Movement in the Malay-Indonesia World in the First Four Decades of the 20th Century: Insights Gained from a Comparative Look at Egypt. *Studia Islamika*, 9(2).
- Fitriani, A. (2025). A Comparative Analysis Of Contemporary Islamic Education Systems: Philosophical, Sociological, And Pedagogical Perspectives From Indonesia, Malaysia, And Egypt. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 53–76.
- Khamdan, M., Fata, A. K., Macpal, S., & Kamaruzzaman, K. (2025). Social Media and Political Mobilization in General Elections in Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 211–238.
- Latif, M. A. (2024). Political struggle of Malaysia and Islam: moderating and radicalizing the state, society, and religion alternately (1957–2023). *Discover Global Society*, 2(1), 40.
- Nasihin, N., & Dahlan, M. (2022). Transformasi Pemikiran Pembaharuan Islam di Indonesia Abad Ke-20. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 211–228.
- Okthariza, N. (2022). Between the Internal Struggle and Electoral Rules Effect: The Challenges of Political Islam in a Democratic Indonesia. In *Society and Democracy in South Korea and Indonesia* (pp. 39–59). Springer.
- Oztig, L. I. (2023). Tunisia, Egypt, and Libya After the Arab Spring. *Middle East Policy*, 30(1), 137–156.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional theory in political science: The new institutionalism*. Edward Elgar Publishing.

- Qutb, S. (1964). *Ma'alim fi al-Tariq*. Cairo: *Dar Al-Shuruq*.
- Schwartz, D., & Galily, D. (2021). The Muslim Brotherhood in Egypt: Ideology vs. Pragmatism. *Open Journal for Studies in History*, 4(1).
- Sebastian, L. C., Hasyim, S., & Arifianto, A. R. (2021). *Rising Islamic Conservatism in Indonesia*. New York: Routledge.
- Sumaktoyo, N. G. (2025). The Broader Political Significance of Houses of Worship: Theory and Evidence from Indonesian Mosques. *Perspectives on Politics*, 1–23.
- Yasih, D. W. P., & Hadiz, V. R. (2023). Precarity and Islamism in Indonesia: The contradictions of neoliberalism. *Critical Asian Studies*, 55(1), 83–104.
- Zald, M. N., & McCarthy, J. D. (1979). *The dynamics of social movements: Resource mobilization, social control, and tactics*. Winthrop Publishers.
- Zulian, P. B., & Hayati, N. N. (2024). 2024/37 “Bleak Future for Islamic Parties in Indonesia after the 2024 Election” by Pradana Boy Zulian and Neni Nur Hayati.
- Zulkarnaen, I., Chaidar, A., Sahrasad, H., & Januar, E. (n.d.). *Program Ratifikasi Konvensi PBB tentang Daftar Hitam Organisasi Teroris*.
- Zulkarnaini, Z., Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2022). Sharia in power: non-Muslims and the performance of Islamic politics in Aceh public Sphere, Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 257–283.